

Rencana Strategis 2017-2022



Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Atas asung kerta wara nugraha *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Kabupaten Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isustrategis di dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 maka sesuai dengan ketentuan pada Bab V pasal 15 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan RENSTRA-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan ini tentunya masih jauh dari sempurna sehingga bantuan berupa masukan dan saran dari semua pihak tentunya sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan program dan kegiatan dimasa yang akan datang dan semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan khususnya pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Singaraja,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, SH
Pembina Tk. I
NIP.19660602 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP	9
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Organisasi.....	17
2.3. Kondisi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP	22
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2013 – 2017)	28
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
3.3. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kabupaten Buleleng dengan Visi Misi Bupati Kepala Daerah.....	50
3.4. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	51
3.5. Telaah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	53
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal PPTSP Kabupaten Buleleng	59
4.2. Tujuan dan Sasaran	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
5.1. Strategi	61
5.2. Arah Kebijakan	61

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	63
6.2. Indikasi Pendanaan Program dan Kegiatan dalam Jangka Menengah.	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU ADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	74
7.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) penanaman Modal.	74
7.2. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77
BAB VIII PENUTUP	79
8.1. KAIDAH PELAKSANAAN	79
8.2. PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS	10
Tabel 2.2	Data Tenaga Kontrak sampai dengan Tahun 2017	10
Tabel 2.3	Data PNS Menurut Jenis Kelamin	10
Tabel 2.4	Data Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.5	Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2017	11
Tabel 2.6	Daftar Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 2.7	Data PNS Berdasarkan Golongan sampai Tahun 2017	12
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana	12
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja DMPPTSP Tahun 2013-2017	38
Table 2.10	Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan	39
Table 2.11	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	40
Table 2.12	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017	41
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	43
Tabel 2.14	Perkembangan Investasi Kab. Buleleng Periode Tahun 2012-2017.....	49
Tabel 2.15	Perkembangan Tingkat Efisiensi Investasi Tahun 2012-2016	50
Tabel 2.16	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d. 2017	50
Tabel 2.17	Jumlah Investor PMDN / PMA Tahun 2012 s.d. 2017	51
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	59
Tabel 3.2.	Cascading Renstra DPMPTSP Kabupaten Buleleng	62
Tabel 3.3	Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan	64
Tabel 3.4.	Isu Strategis di Kabupaten Buleleng	65
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Hasil Kajian/Review	71
Tabel 5.1.	Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang tertuang di RPJMD dengan Renstra DPMPTSP	73
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022	78
Tabel 6.2	Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2022.....	85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD	3
Gambar 1.2 Bagan Penyusunan Renstra	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPPTSP Kabupaten Buleleng	24
Gambar 2.5 Diagram Perbandingan Pagu Ses uai Anggaran Perubahan	39
Gambar 2.6 Diagram Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan Realisasi	40
Gambar 2.7 Diagram Perbandingan Pagu Belanja Tidak Langsung dan Realisasi	40
Gambar 2.8 Diagram Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	41
Gambar 2.9 Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi Kabupaten Buleleng.

Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA).

“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan OPD Kabupaten Buleleng”.

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP sebagai sub Sistem manajemen Pemerintahan senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi sejalan dengan dinamika yang terjadi dimasyarakat. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai tolok ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan urusan membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal diwajibkan menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,disamping itu disebutkan pula bahwa perlu adanya dokumen perencanaan daerah sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

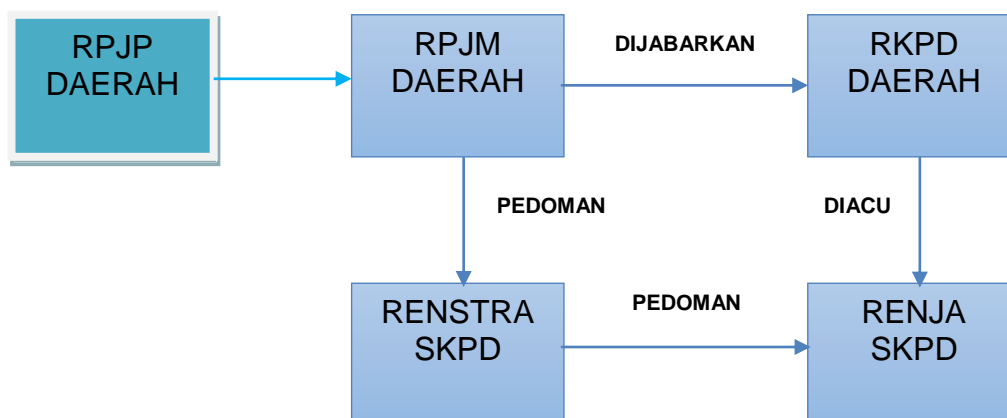
Rencana Strategis Dinas Pnanaman Modan Dan PPTSP Kabupaten Buleleng merupakan rencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2017-2022 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng pada setiap akhir tahun anggaran.

Buleleng sebagai salah satu subsistem dari sistem nasional atau global, tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Buleleng termasuk Bidang Penanaman Modal di masa depan, faktor-faktor global, sebagai faktor eksternal, harus mendapat perhatian serius, disamping faktor-faktor internal itu sendiri. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek.

Secara garis besar Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng mencakup visi, misi kepala daerah serta strategi pencapaian visi maka ditetapkan program pendukung Program prioritas dengan kegiatan sesuai dengan kewenangan kabupaten, namun tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan bagian tak terpisahkan

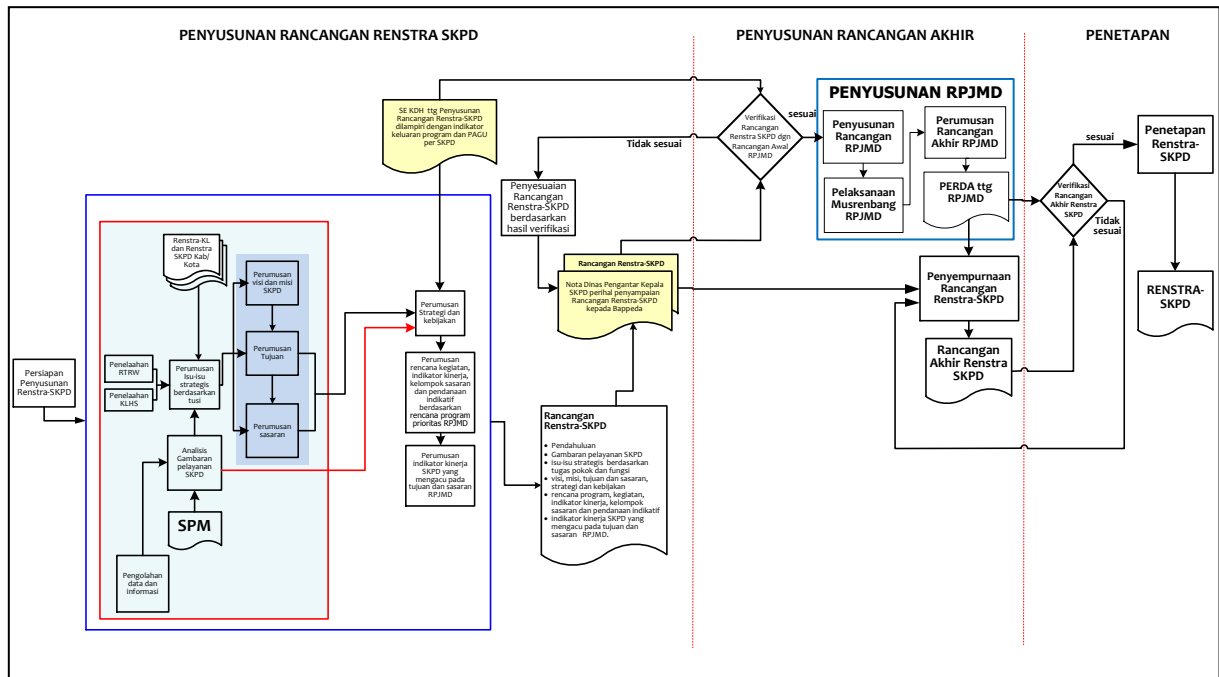
dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai dokumen perencanaan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng , yang mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, aspirasi masyarakat, swasta dan instansi/lembaga terkait.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPDA dan Renstra SKPD

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kemendagri yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan

Melihat perkembangan ekonomi dan peningkatan investasi serta dinamika permasalahan perekonomian yang ada saat ini dan dimasa mendatang, diharapkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP (2017-2022) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan kedepan, khususnya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan permasalahan Ekonomi Daerah pada tingkat lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang Penanaman Modal.



Gambar 1.2 Bagan Penyusunan Renstra

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng ini dilandasi oleh:

- Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - i. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
 - k. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - p. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
- u. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
- x. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2013, tentang RPJPD, Kabupaten Buleleng, 2005-2025.
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- bb. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 yaitu :

- a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Buleleng
- b. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022, yaitu :

- a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Buleleng .
- b. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Buleleng .
- c. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Buleleng pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- e. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, keterkaitan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja SKPD dan sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kinerja pelayanan dalam mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas gambaran dan peluang yang masih

hadapan pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

Bab ini memuat berbagai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng seperti identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan kajian Lingkungan Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD atas telaahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu lima tahun. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

Dalam Bab ini diuraikan indikator kinerja yang akan ditetapkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta indikator kinerja kunci (IKK) urusan Penanaman Modal serta secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 sesuai target capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksanaan dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP mempunyai tugas pokok:

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi diuraikan sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

- berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengamawasan, evaluasi dan monitoring seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta UPT ;
 - g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - i. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - k. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - l. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang - undangan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;

- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan perijinan dan non perijinan penanaman modal;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

4. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

4. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN A.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan

yang meliputi : Ijin Prinsip, SITU, Ijin Medirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha Perikanan (IUP), Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Ijin Reklame, Ijin Lokasi;

- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan A;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

5. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN B.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan yang meliputi : Ijin Pendirian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, ijin Trayek, Ijin Usaha Penyelenggaraan Anggkutan, Legalisir Ijin Bengkel Umum Kendaraan, Ijin Usaha lindustri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), SIUP minuman Beralkohol, Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Ijin Penimbunan Bahan Bakar Minyak, Ijin Penganggkutan Kayu rakyat, Ijin Pemotongan Hewan, Ijin Penyediaan Daging, Ijin Operasional Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Ijin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Perijinan di bidang penanaman modal/investasi;
- e. melaksanakan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan B;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

6. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

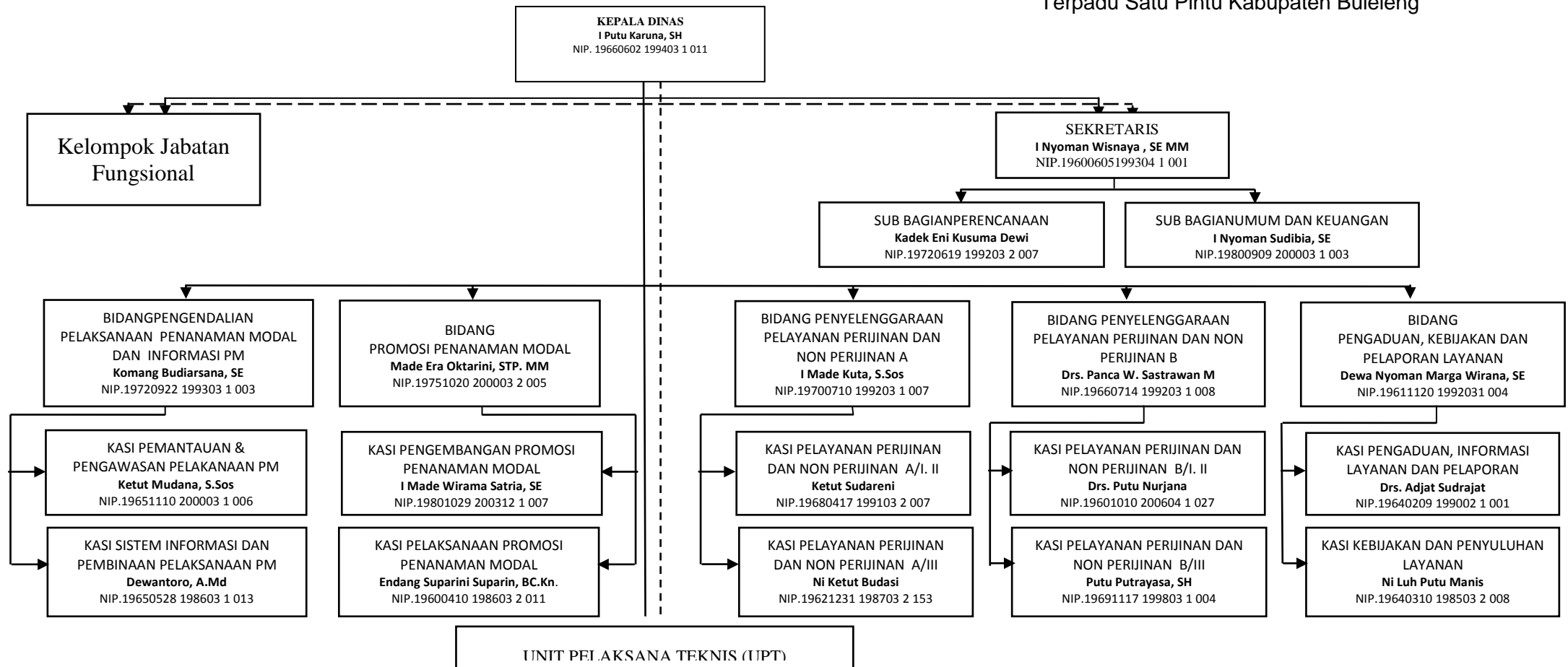
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi, melaksanakan koordinasi layanan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran mutu layanan perijinan dan non perijinan dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- f. memfasilitasi, melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan serta memberikan pendampingan advokasi;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar 2.1 berikut.

Nomor : 75 Tahun 2016
 Tanggal : 28 Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng

2.2. Sumber Daya Organisasi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan program kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng didukung oleh sumber daya, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber daya pendukung. Sumber daya ini merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktivitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Adapun sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2017 berjumlah 89 orang, dengan komposisi PNS sebanyak 34 orang, Honor Daerah 2 orang, dan Tenaga Kontrak 53 orang.

1) Data PNS

Tabel 2.1 Data PNS

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-

3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	2
6	Pengatur (II/c)	2	2	4
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
8	Penata Muda (III/a)	3	2	5
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	2	6
10	Penata (III/c)	2	1	3
11	Penata Tk. I (III/d)	5	2	7
12	Pembina (IV/a)	2	1	3
13	Pembina Tk. I (IV/b)	2	-	2
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
TOTAL :		22	12	34

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

2) Data Tenaga Kontrak sampai dengan Tahun 2017

Tabel 2.2 Data Tenaga Kontrak sampai dengan Tahun 2017

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	21	28	49
2	Tenaga Kontrak Sopir	2	-	2
3	Tenaga Kontrak <i>cleaning sevice</i>	2	-	2
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	2	-	2
TOTAL :		27	28	55

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

3) Data PNS menurut jenis kelamin di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2017

Tabel 2.3 Data PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	5	5	10
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	4	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	2	2	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	4	3	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	4	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2	2	4
Jumlah		22	12	34

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

4) Data Tenaga Kontrak menurut jenis kelamin di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2017

Tabel 2.4 Data Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	9	7	16
2	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	2	4	6
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	2	4	6
4	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	7	5	12

5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	4	6	10
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	3	2	5
	Jumlah	27	28	55

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

5) Data PNS Menurut Jenjang Pendidikan sampai dengan Tahun 2017

Tabel 2.5 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2017

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	2	2	-	-	10
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	-	4	-	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	1	2	-	1	-	-	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	2	-	5	-	-	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	-	4	-	-	-	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	3	-	1	-	-	4
	Jumlah	2	21	2	9	-	-	34

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

6) Data Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.6 Daftar Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	-	2	2	10	1	1	16
2	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	-	5	1	-	-	-	6
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	-	2	-	4	-	-	6
4	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	3	3	6	-	-	12
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	-	3	2	5	-	-	10
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	3	-	2	-	-	5
	Jumlah	0	18	8	27	1	1	55

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

7) Data PNS Menurut Golongan sampai dengan Tahun 2017

Tabel 2.7 Data PNS Berdasarkan Golongan sampai Tahun 2017

No.	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan												Jml	
		II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Kepala Dinas										1				1
2	Sekretariat			3	1	2	2	1			1				10
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi PM					1	1		2						4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal				1				2	1					4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A		2	1			1	2	1						7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B					1		1	1	1					4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan					1			1	2					4
	Jumlah		2	4	2	5	4	4	7	4	2				34

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana (Sumber Daya Pendukung)

Dalam pelaksanaan fungsi tugas Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng didukung Sekretariat gedung kantor dan prasarana pendukung lainnya. Secara difinitif sekretariat gedung yang di dimanfaatkan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Secara administrasi memang pelayanan perijinan beralamat di jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja, diatas sebidang tanah pemerintah Kabupaten Buleleng Gedung kantor yang dimanfaatkan tersebut secara fisik bangunan belum representatif sebagai fungsi gedung sebagai tempat pelayanan publik terutama gedung bangunan induk seluas 1800 m² yang dimanfaatkan oleh 5 bidang.

Sebagai aset Daerah bahwa nilai atas tanah dimaksud sebesar Rp.1.850.000.000 atau 54% dari total nilai aset. Sementara aset berupa bangunan dan gedung sebesar Rp.687.000.000,- atau sekitar 20% terhadap total aset. Untuk Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti peralatan dan mesin sebesar Rp.850.998.056,- atau 25% dari total aset. Selanjutnya aset berupa jaringan sekitar 1% atau Rp. 34.372.543,00 untuk lebih jelasnya terhadap aset daerah yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dapat dilihat seperti dalam tabel berikut

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana

Uraian	Jumlah	Satuan
1. Mobil	3	Unit
2. Sepeda motor :	16	Unit
3. Komputer :		
1. PC	38	Unit
2. Laptop	10	Unit
3. Projector	1	Unit
4. Printer	40	Unit
4. Meubeler :		
1. Meja Kerja	55	Buah
2. Meja Eselon III	1	Buah
3. Meja Eselon IV	1	Buah
4. Meja Panjang	4	Buah
5. Kursi Kerja	80	Buah
6. Kursi Eselon III	1	Buah
7. Kursi Eselon IV	4	Buah
8. Kursi Rapat	40	Buah
9. Sofa	3	Set
10. Brankas	2	Buah
11. Lemari	1	Buah
12. Karpet	4	Buah
5. Mesin Ketik	5	Buah
6. Filling Cabinet	7	Buah
7. Elektronik :		
1. Televisi	3	Unit
2. Kamera	2	Unit
3. AC	5	Unit
4. Faximili	2	Unit
5. Kulkas	1	Unit
6. Parabola	1	Unit
7. Reciver	2	Unit
8. Tape	1	Unit
9. UPS	6	Buah
10. Microphone/Wireless Mic	1	Unit
11. Stavolt	3	Buah
12. PABX	3	Unit
13. Wireless	1	Buah
14. Alat Detektor Uang Palsu	1	Uni
15. Kipas Angin	11	Buah
16. Dispenser	1	Buah
8. Rak :		
1. Rak Kayu	7	Buah
2. Rak TV	1	Buah
2. Rak Besi	4	Buah
9. Korden	72	Set
10. Jam Dinding	5	Buah
11. Papan White Board	7	Buah
12. Tabung Gas	1	Buah
13. Kompor Gas	1	Buah
17. Trali	25	Buah

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan PPTSP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terhadap sumber daya PNS masih kurang, hal ini terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku mempersyaratkan tenaga yang diharuskan adalah PNS, disamping itu dari jenjang pendidikan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

kekurangan tenaga PNS dengan dasar pendidikan dari Ekonomi, Informatika dan tenaga teknis bangunan, hal ini dibutuhkan karena Dinas Penanaman Modal dan PPTSP memverifikasi bangunan dari permohonan izin IMB yang terdaftar yang perlu diawasi dan ukur kesesuaian berkas dan bangunan fisiknya.

Terhadap daya dukung sarana prasarana yang ada, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP menempati Gedung Kantor yang beralamat di jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja, yang jumlah gedungnya terdiri dari : 2 Unit Gedung Kantor, 1 Gedung sebagai Gedung Induk untuk Pelayanan dan 1 untuk Bidang sekretariat dan Arsip, Tempat Parkir Roda Empat dan tempat parkir kendaraan roda dua .

Sarana prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan Dinas Operasional terdapat 3 buah untuk operasional dinas milik Pemkab Buleleng dan 2 kendaraan sewa untuk operasional Kepala Dinas dan Sekretaris, kendaraan roda 2 sebanyak 19 unit. Kondisi ini masih dianggap kurang mengingat kegiatan operasional di lapangan baik untuk survey lapangan bagi perizinan yang memerlukan adanya survey, monitoring penanaman modal dan kegiatan lainnya sangat memerlukan kendaraan roda 4 khususnya untuk mengangkut bahan pembongkaran reklame dibutuhkan kendaraan Pick Up.

Sarana lainnya seperti komputer, printer, meja dan kursi kerja dan sarana pendukung lainnya sudah mencukupi, hanya saja perlu dilakukan perawatan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas. Alamat Kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng di Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja Nomor Telp (Fax): (0362) 22063 dan website dpmpptsp.bulelengkab.go.id

2.3. Kondisi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal. Jumlah izin yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan PPSTP juga menjadi bertambah, dari yang awalnya

menangani 33 (tiga puluh tiga) jenis izin, sekarang menjadi menangani 42 (empat puluh dua) jenis izin terbagi menjadi 13 (tiga belas) izin bidang A dan 29 (dua puluh sembilan) izin bidang B.

a. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

Izin yang membayar terdiri dari 5 (lima) izin yaitu:

1. Pajak Reklame
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Sedangkan izin yang tidak membayar terdiri dari :

6. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
7. Izin Lokasi
8. Izin Prinsip adalah Pemberian Izin untuk mendirikan bangunan;
9. Izin Prinsip Penanaman Modal;
10. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
11. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
12. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
13. Izin Prinsip Persetujuan Penanaman Modal;

b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

Izin yang membayar terdiri dari 5 (lima) izin yaitu:

1. Izin Trayek

Izin yang tidak membayar terdiri dari 28 izin yaitu:

2. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)
3. Izin Usaha Industri (IUI)
4. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
5. Izin Penyediaan Daging
6. Izin Pematangan Hewan
7. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok.
8. Izin Penyosohan Beras
9. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak
10. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat
11. Legalisir Izin Perndirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
12. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

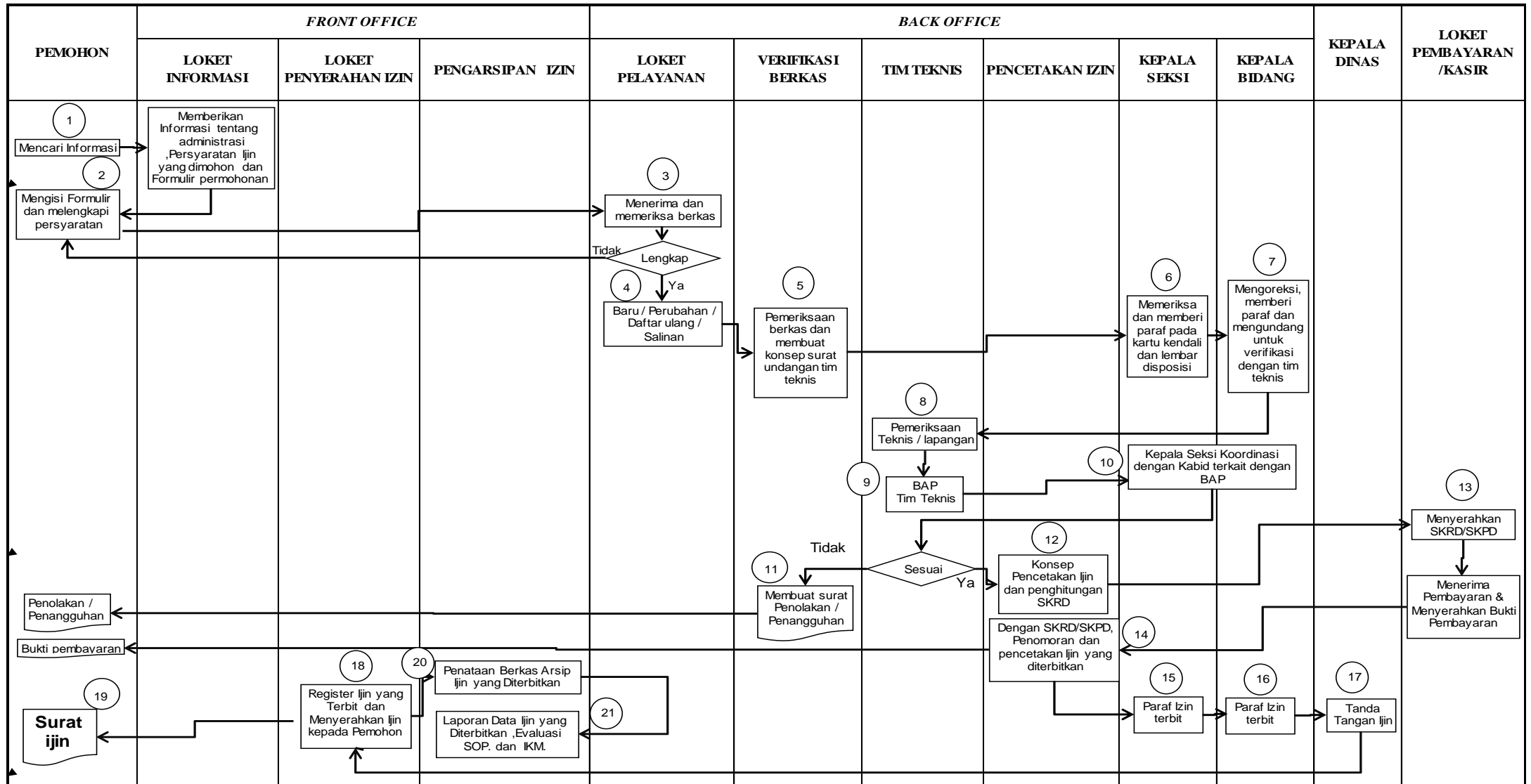
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
16. TDUP Usaha Perjalanan Wisata
17. TDUP Penyediaan Jasa Akomodasi
18. TDUP Jasa Makanan dan Minuman
19. TDUP Kawasan Pariwisata
20. TDUP Jasa Transportasi Wisata
21. TDUP Daya Tarik Wisata
22. TDUP Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
23. TDUP Jasa Pramuwisata
24. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
25. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
26. TDUP Jasa Informasi Pariwisata
27. TDUP Wisata Tirta
28. TDUP SPA
29. Izin Kesehatan

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin adalah sebagai berikut.

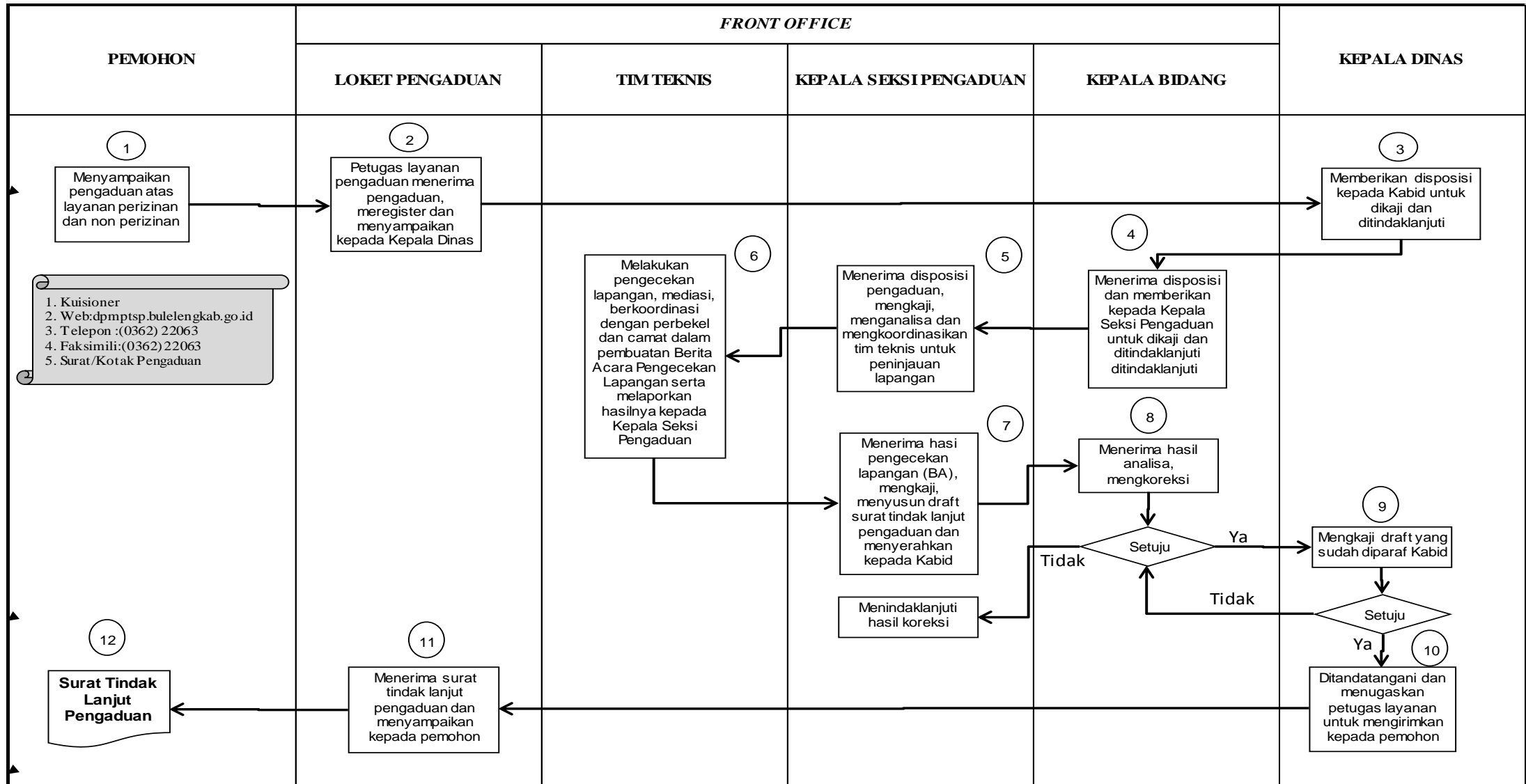
1. Pemohon mencari informasi pada Loker Informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan serta memberikan formulir pendaftaran;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengajukan atau memasukkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pelayanan A/B;
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Jika persyaratan sudah lengkap prosedur selanjutnya adalah petugas verifikasi mengecek apakah termasuk permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan;
5. Petugas verifikasi berkas melakukan pemeriksaan teknis terhadap berkas-berkas tersebut dan membuat surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan;
6. Kepala Seksi memeriksa dan memberi paraf lembar disposisi permohonan yang lengkap untuk diajukan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B untuk memohon tindak lanjut;

7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B menganalisa berkas dan mengajukan persetujuan verifikasi lapangan serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan Verifikasi lapangan;
8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan BAP kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B;
9. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan A/B berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B membuat surat penolakan jika hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan (Peraturan Daerah, RTRW, RDTR dan Peraturan lainnya), kemudian diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
10. Petugas verifikasi berkas membuat surat penolakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
11. Jika hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai maka permohonan perizinan disetujui berdasarkan BAP oleh Tim Teknis, petugas akan mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagai dasar pembayaran Retribusi di Loker Pembayaran dan Kasir;
12. Setelah pemohon menyerahkan SKRD/SKPD dan melakukan pembayaran pada loket pembayaran/kasir maka pemohon akan diberikan bukti pembayaran.
13. Berdasarkan SKRD/SKPD, petugas pencetakan izin akan melakukan penomoran dan pencetakan izin,;
14. Selanjutnya izin yang sudah dicetak dikoreksi dan diparaf oleh Kasi
15. Izin yang sudah dicetak juga dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B
16. Setelah paraf dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang lengkap baru izin diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
17. Loker Penyerahan Izin pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan akan meregister izin yang terbit dan menyerahkan kepada pemohon;
18. Izin diterima oleh pemohon sesuai dengan jenis izin yang diajukan;
19. Semua jenis perizinan yang telah diterbitkan, selanjutnya berkasnya disimpan sebagai bagian dari Dokumen Negara;
20. Laporan data izin yang diterbitkan dan pengaduan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi layanan perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Gambar 2.2 berikut adalah alur/skema pengurusan permohonan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng.



Gambar 2.3 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan



Gambar 2.4 Alur/Skema Pengaduan

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2013 – 2017)

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pencapaian kinerja terhadap target RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.

2.4.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP Kabupaten Buleleng

Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang sangat baik, yakni dengan jumlah pencapaian realisasi sudah memenuhi target. Namun pada indikator kinerja Nilai IKM pada Tahun 2014 masih kurang pencapaiannya. Adapun yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada indikator Nilai IKM yaitu kurangnya kemampuan SDM di bidang pemahaman peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perijinan. Capaian Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja DMPPTSP Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 hari	Ijin	1.000	1.336	1.000	1.055	1.000	1.106	1.000	1.385	1.000	2.817
2.	Nilai IKM	Nilai	79,00	80,23	80,00	79,75	80,00	80,25	80,25	80,26	80,50	80,60
3.	% Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : DMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) Indikator program meliputi :

- Indikator prosentase Dokumen IMB yang diterbitkan ditinjau dari Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
- Indikator prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu, IKM Dinas Penanaman Modal selama kurun waktu 2012-2017 cenderung meningkat.

Artinya bahwa pelayanan yang diberikan sudah mencerminkan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat.

- c. Indikator Peningkatan nilai Investasi dilihat dari peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, terjadi kenaikan realisasi investasi dalam 5 (lima) tahun.

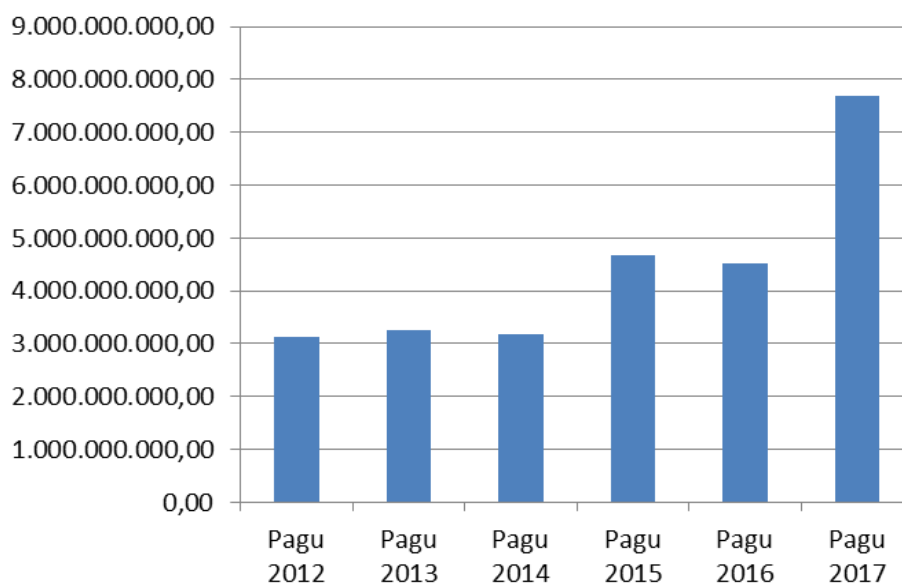
Jika dilihat perbandingan pagu sesuai pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai berikut

Table 2.10 Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan

NO	TAHUN	PAGU		TOTAL PAGU
		BL	BTL	
1	2012	1.327.171.000,00	1.795.510.900,00	3.122.681.900,00
2	2013	1.530.500.000,00	1.736.095.713,00	3.266.595.713,00
3	2014	1.481.500.000,00	1.701.689.226,38	3.183.189.226,38
4	2015	2.403.352.000,00	2.274.987.600,00	4.678.339.600,00
5	2016	1.983.057.124,00	2.529.467.050,00	4.512.524.174,00
6	2017	4.520.812.000,00	3.175.605.375,00	7.696.417.375,00

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.5
Diagram Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan



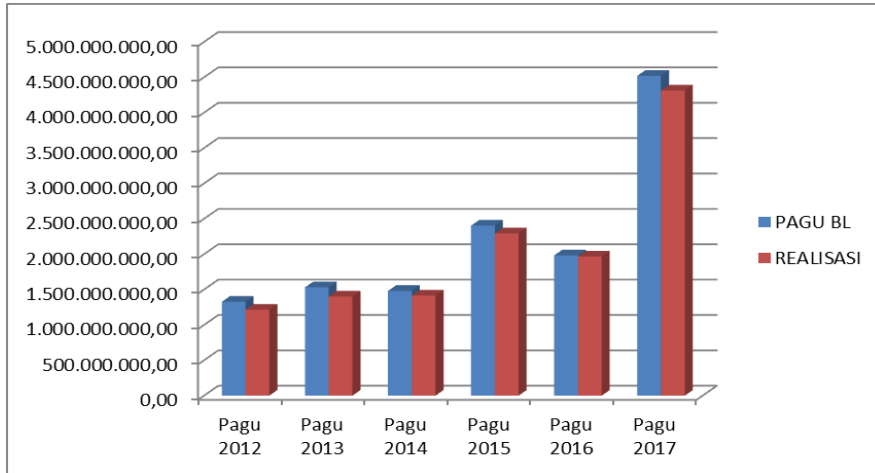
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Table 2.11 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

NO	TAHUN	BL		BTL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2012	1.327.171.000,00	1.214.042.786,00	1.795.510.900,00	1.518.323.461,00
2	2013	1.530.500.000,00	1.400.805.654,00	1.736.095.713,00	1.674.655.930,00
3	2014	1.481.500.000,00	1.413.845.574,00	1.701.689.226,38	1.605.241.100,00
4	2015	2.403.352.000,00	2.293.752.177,00	2.274.987.600,00	2.165.961.936,00
5	2016	1.983.057.124,00	1.965.683.792,00	2.529.467.050,00	2.430.688.005,00
6	2017	4.520.812.000,00	4.313.131.379,00	3.175.605.375,00	3.064.642.373,00

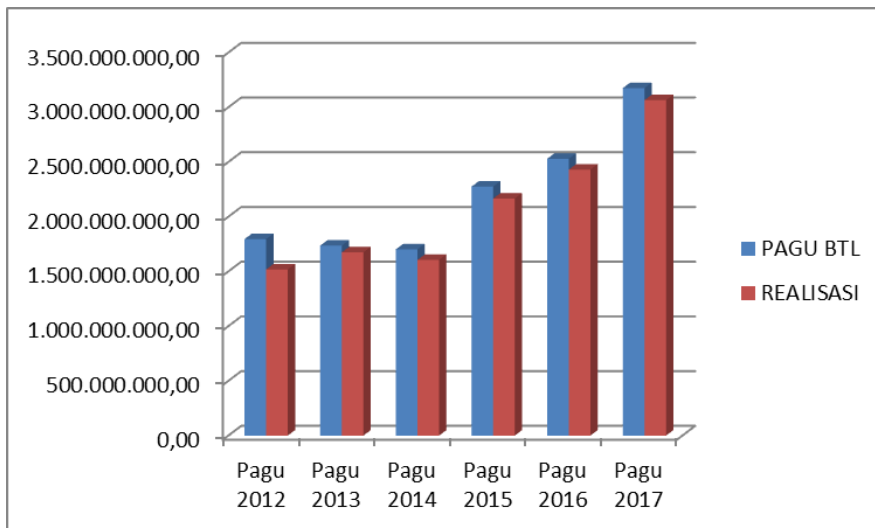
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.6
Diagram Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan Realisasi



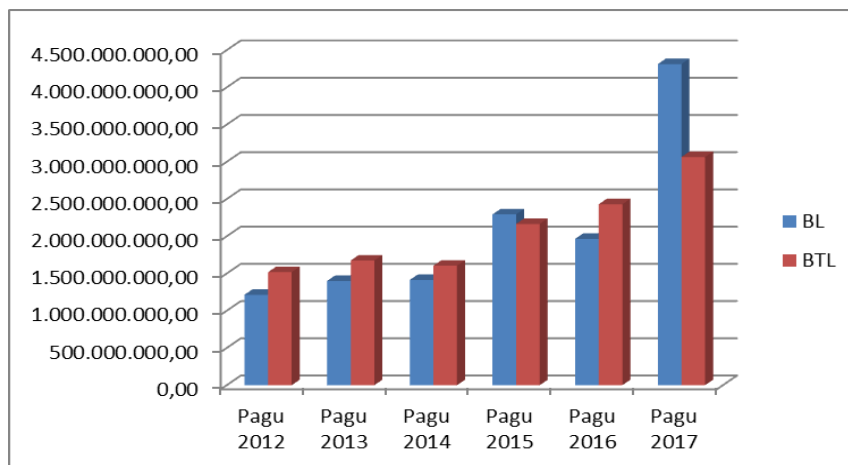
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.7
Diagram Perbandingan Pagu Belanja Tidak Langsung dan Realisasi



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.8
Diagram Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung



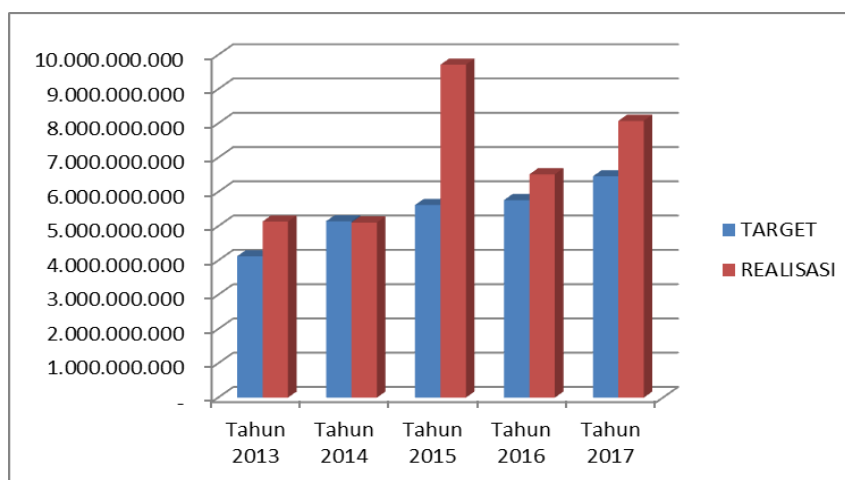
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Table 2.12 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017

TAHUN	PENDAPATAN						
	TARGET			REALISASI			
	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL	%
2013	357.887.000	3.767.113.000	4.125.000.000	444.065.200	4.695.318.425	5.139.383.625	124,59
2014	787.625.000	4.358.713.000	5.146.338.000	937.447.710	4.173.260.740	5.110.708.450	99,31
2015	903.131.000	4.718.100.000	5.621.231.000	741.250.155	8.973.584.770	9.714.834.925	172,82
2016	908.150.000	4.855.600.000	5.763.750.000	938.106.450	5.578.024.050	6.516.130.500	113,05
2017	1.250.000.000	5.207.750.000	6.457.750.000	1.213.802.700	6.862.234.300	8.076.037.000	125,06

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.9
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2013-2017



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Kondisi alokasi total anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Buleleng ditiap tahunnya berfluktuasi, di mana dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, ditahun 2014 mengalami penurunan, tahun 2015 mengalami peningkatan, di tahun 2016 mengalami penurunan kembali karena adanya rasionalisasi dan ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan. Berikut adalah persentase peningkatan maupun penurunan alokasi anggaran dari 2012-2017.

- 2012-2013 : peningkatan sebesar 4.61%
- 2013-2014 : penurunan sebesar 2.55%
- 2014-2015 : peningkatan sebesar 46.97%
- 2015-2016 : penurunan sebesar 3.54%
- 2016-2017 : peningkatan sebesar 70.56%

Penurunan alokasi anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Buleleng lebih disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran misalnya pada tahun 2017 alokasi anggaran pada DPA Induk adalah Rp. 4.305.570.000,00 dan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 4.520.812.000,00, sedangkan untuk peningkatan alokasi anggaran disebabkan karena prioritas program dan kegiatan terutama karena perubahan badan ke dinas yang berdampak pada

menambahnya jumlah program dan kegiatan yang direncanakan. Kegiatan ini yang harus dilaksanakan guna menunjang proses pelayanan perijinan dan penanaman modal di mana pada tahun 2016 hanya terdapat 8 (program) dan 35 kegiatan, yang mana 4 (empat) kegiatan mengalami rasionalisasi. Pada tahun 2017 terdapat program dan kegiatan yang bertambah, yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investas, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Berikut ini Tabel 2.13 adalah rincian anggaran program dan kegiatan dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

Program dan Kegiatan		Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.840.550	560.456.437	88	550.023.500	534.599.374	97	979.045.125	956.580.531	97,71	727.497.918	717.525.328	98,63	1.403.552.000	1.368.353.364	97,49
	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.533.100	53.333.100	98	33.600.000	33.600.000	100	33.100.000	32.162.500	97,16	37.600.000	37.518.000	99,78	40.000.000	39.319.000	98,29
	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.841.775	18.702.916	72	28.813.300	25.163.774	87	33.002.000	27.563.361	83,52	36.502.000	28.283.284	77,48	55.000.000	42.627.294	77,50
	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000	72.758.065	93	78.000.000	78.000.000	100	195.600.000	195.600.000	100,00	165.600.000	165.526.016	99,95	170.000.000	169.822.000	99,89
	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	1.800.000	1.614.000	89	3.000.000	2.583.000	86,10	3.000.000	2.859.600	95,32	5.200.000	3.411.900	65,61
	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.983.800	131.956.256	96	85.925.000	83.625.000	97	130.076.000	129.392.400	99,47	127.449.000	127.249.000	99,84	217.725.000	216.886.200	99,61
	008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.272.200	36.272.200	100	52.696.200	52.696.200	100	86.400.000	86.381.290	99,97	98.400.000	98.381.840	99,98	98.500.000	98.480.730	99,98
	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	126.709.600	126.709.600	100	136.854.800	136.854.800	100	245.109.725	242.693.660	99,01	179.769.678	179.769.678	100	224.992.000	222.551.525	98,91
	011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000	6.250.000	100	14.321.200	13.121.200	91	26.397.400	20.931.410	79,29	14.000.000	13.748.870	98,20	18.200.000	14.172.131	77,86
	012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	1.108.000	1.108.000	100	3.000.000	2.970.000	99,00	2.999.040	2.999.040	100	5.746.350	5.738.260	99,85
	013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.794.675	57.150.000	97	47.500.000	47.050.000	99	106.750.000	105.298.910	98,64	24.000.000	23.699.500	98,74	369.075.000	357.318.900	96,81
	015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.840.000	2.905.000	76	4.500.000	3.120.000	69	3.360.000	3.360.000	100,00	4.120.000	4.020.000	97,57	6.000.000	5.940.000	99,00
	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	5.990.400	5.365.400	90	4.825.000	4.825.000	100	16.750.000	15.174.000	90,59	5.352.000	5.345.900	99,88	17.200.000	17.095.510	99,39
	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	99.625.000	49.053.900	49	60.080.000	53.821.400	89	96.500.000	92.470.000	95,82	28.706.200	28.124.600	97,97	175.913.650	174.989.914	99,47

Program dan Kegiatan		Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.766.700	146.995.400	96	147.210.000	145.109.900	99	133.956.875	125.718.354	93,85	77.593.351	75.988.296	97,93	633.625.000	508.506.610	80,25	
	003	Pembangunan Gedung Kantor	32.597.200	32.500.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000.000	-	-	
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	14.650.500	86	34.000.000	33.036.000	97	-	-	-	-	-	67.500.000	63.751.500	94,44	
	012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	47.450.000	46.450.000	98	49.560.000	48.940.000	98	54.500.000	53.254.110	97,71	30.000.000	29.905.730	99,68	76.000.000	73.934.420	97,28
	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.800.000	99	15.000.000	14.690.000	98	25.000.000	23.000.000	92,00	-	-	-	-	-	-
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.419.500	23.364.900	88	38.150.000	37.943.900	99	39.956.875	35.541.984	88,95	42.893.351	41.582.716	96,94	58.000.000	55.430.720	95,57	
	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	6.125.000	5.549.970	90,61	
	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.300.000	10.230.000	99	10.500.000	10.500.000	100	14.500.000	13.922.260	96,01	1.700.000	1.499.850	88,22	10.000.000	7.524.000	75,24
	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000.000	203.316.000	97,74
	048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.000.000	99,00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.500.000	9.378.600	89	9.000.000	7.500.000	83	55.500.000	55.299.500	99,64	15.000.000	13.998.600	93,32	88.825.000	88.823.300	99,99	
001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700.000	7.700.000	100	
	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.500.000	9.378.600	89	9.000.000	7.500.000	83	10.500.000	10.499.500	99,99	15.000.000	13.998.600	93,32	-	-	-
	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000.000	16.998.300	99,99
	006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	-	-	-	-	-	-	45.000.000	44.800.000	99,55	-	-	-	64.125.000	64.125.000	100
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100	
003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100	

Program dan Kegiatan		Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.150.000	9.830.000	97	23.585.000	18.485.000	78	38.050.000	37.210.800	97,79	46.770.000	46.649.950	99,74	94.990.000	93.950.100	98,90
	001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.150.000	9.830.000	97	23.585.000	18.485.000	78	27.050.000	26.510.800	98,00	28.000.000	27.880.000	99,57	57.000.000	56.010.700	98,26
	004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	11.000.000	10.700.000	97,27	18.770.000	18.769.950	99,99	37.990.000	37.939.400	99,86
07	Program Perencanaan Anggaran SKPD	23.150.000	23.150.000	100	29.910.000	29.110.000	97	75.500.000	75.211.470	99,62	84.020.000	83.796.130	99,73	100.000.000	99.682.710	99,68
	001 Penyusunan Anggaran SKPD	23.150.000	23.150.000	100	29.910.000	29.110.000	97	75.500.000	75.211.470	99,61	84.020.000	83.796.130	99,73	100.000.000	99.682.710	99,68
08	Program Informasi Pembangunan Daerah	30.000.000	24.999.000	83	5.400.000	5.000.000	93	-	-	-	20.998.000	20.998.000	100	20.000.000	19.995.410	99,97
	001 Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	30.000.000	24.999.000	83	5.400.000	5.000.000	93	-	-	-	20.998.000	20.998.000	100	20.000.000	19.995.410	99,97
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.200.000	501.861.593	97,41
	001 Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	86.940.118	99,36
	013 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.700.000	188.253.550	93,79
	014 Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.260.000	121.176.590	99,93
	018 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.740.000	105.491.335	99,76
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683.320.000	668.587.506	97,84

Program dan Kegiatan			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
005	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.600.000	65.345.750	96,66	
007	Kajian Kebijakan Penanaman Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.100.000	164.320.856	98,92	
009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.900.000	91.429.650	95,33	
012	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.520.000	46.397.000	97,63	
013	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.000.000	250.970.650	98,80	
014	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.200.000	50.123.600	96,02	
17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.000.000	104.588.462	97,74	
001	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.000.000	104.588.462	97,74	
18	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		669.092.750	625.996.217	94	716.371.500	674.041.300	94	1.109.300.000	1.031.731.522	93,01	1.011.177.855	1.006.727.488	99,56	864.300.000	848.782.324	98,20
001	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan		235.091.000	221.539.650	94	353.152.000	322.291.700	91	471.800.000	457.402.508	96,94	446.454.760	445.535.933	99,79	-	-	-
002	Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan		-	-	-	50.000.000	49.800.000	100	60.000.000	39.804.900	66,34	71.395.750	69.553.250	97,41	-	-	-
003	Pengendalian dan Penerbitan Perizinan		72.335.000	71.976.300	100	88.760.000	88.754.900	100	119.000.000	115.697.442	97,22	129.799.400	129.332.130	99,64	-	-	-
004	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan		50.355.000	46.794.000	93	13.580.000	12.965.000	95	80.740.000	55.711.286	69,00	40.121.595	40.121.595	100	50.000.000	48.456.580	96,91

Program dan Kegiatan			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
005	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan		121.100.000	98.602.200	81	14.400.000	12.250.000	85	60.000.000	55.374.576	92,29	16.440.350	16.440.350	100	-	-	-
006	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu		-	-	-	71.800.000	64.510.950	90	96.760.000	96.287.240	99,51	120.848.750	119.869.540	99,18	141.800.000	137.714.620	97,11
007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan		1.605.000	1.600.000	100	15.884.500	15.600.000	98	35.000.000	27.114.070	77,46	21.185.250	21.185.190	99,99	60.000.000	56.330.750	93,88
008	Penataan Informais dan Berkas Perizinan		82.611.250	79.488.567	96	43.820.000	42.893.750	98	65.000.000	64.992.000	99,98	53.172.000	53.172.000	100	-	-	-
009	Pelayanan Perizinan, Retribusi dan Pengelolaan Register		105.995.500	105.995.500	100	64.975.000	64.975.000	100	121.000.000	119.347.500	98,98	111.760.000	111.517.500	99,78	-	-	-
010	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.000.000	334.377.974	98,92
011	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.500.000	271.902.400	99,05
TOTAL			1.530.500.000	1.400.805.654	91,53	1.481.500.000	1.413.845.574	95,43	2.403.352.000	2.293.752.177	95,44	1.983.057.124	1.965.683.792	99,12	4.520.812.000	4.313.131.379	95,40

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Penanaman Modal

a. Perkembangan Investasi

Inventasi adalah nilai kekayaan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sumber inventasi dapat berasal dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Investasi pemerintah berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Sedangkan, investasi dunia usaha dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Peranan investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam mendukung sejumlah proyek infrastruktur ekonomi maupun bidang sosial dan kehidupan masyarakat di daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai sekitar Rp. 4.676 miliar rata-rata per tahun. Secara absolut, perkembangan investasi di Kabupaten Buleleng cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 total investasi mencapai sekitar Rp 4,288 miliar meningkat menjadi Rp 4,431 miliar pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp 5.301 miliar pada tahun 2016.

Akan tetapi secara relatif, pertumbuhan investasi cukup berfluktuatif. Pertumbuhan investasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,60%. Sedangkan, pertumbuhan investasi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,0%. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan investasi mencapai sekitar 6,1% rata-rata per tahun.

Tabel 2.14 Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2012-2017

TAHUN	INVESTASI		
	Nilai	Pertumbuhan	Kontribusi
	(miliar Rp)	(%)	(%)
2012	4,288.31	8.53	27.70
2013	4,431.22	3.33	26.71
2014	4,564.97	3.02	25.73
2015	4,793.94	5.02	25.46
2016	5,301.96	10.60	26.56
Rata-rata	4,676.08	6.10	26.43

Sumber : Badan Statistik Provinsi Bali , 2017 (Data diolah)

Pada sisi lain, kontribusi investasi dalam perekonomian daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai sekitar 26,4% rata-rata per tahun. Akan tetapi kontribusinya cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012 kontribusi investasi dalam ekonomi mencapai sekitar 27,7% menurun menjadi sekitar 26,5% pada tahun 2016.

Jumlah investasi yang besar adalah penting, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas investasi itu sendiri. Kualitas investasi dapat diukur dengan melihat tingkat *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, yaitu;

rasio antara tambahan nilai ekonomi dibandingkan dengan jumlah investasi yang dibutuhkan. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien suatu perekonomian atau inventasi semakin berkualitas. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR menunjukkan semakin tidak efisien suatu perekonomian atau investasi semakin tidak berkualitas sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Perkembangan Tingkat Efisiensi Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Tahun	Tambahan PDRB	Inventasi	ICOR
	(miliar Rp)	(miliar Rp)	
2012	982.84	4,288.31	4.36
2013	1,106.98	4,431.22	4.00
2014	1,106.98	4,564.97	4.12
2015	1,086.34	4,793.94	4.41
2016	1,131.84	5,301.96	4.68
Rata-rata	1,083.00	4,676.08	4.32

Sumber : Badan Statistik Provinsi Bali , 2017 (Data diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai ICOR kabupaten Buleleng mencapai 4,3%. Tantangan ke depan adalah bahwa bagaimana data diupayakan nilai ICOR ini dapat secara gradual diturunkan sehingga iklim investasi semakin kondusif (easy of doing business yang semakin baik).

b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)

Peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting, dalam mendukung sejumlah proyek infrastruktur ekonomi maupun bidang sosial dan kehidupan masyarakat di daerah. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan di daerah. Dari data yang ada, pemerintah daerah sudah dapat mendorong tumbuhnya investasi dalam negeri, dengan jumlah investor bervariasi dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 investor mencapai 156 investor dengan realisasi anggaran mencapai 1,042 trilyun dengan 157 investor.

Tabel 2.16 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d. 2017 Kabupaten Buleleng

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2012	181	144.316.539.250	181	144.316.539.250
2013	40	75.505.000.000	40	75.505.000.000
2014	156	263.125.478.000	156	263.125.478.000
2015	157	10.042.866.236.716	157	10.042.866.236.716
2016	156	1.041.870.243.000	156	1.041.870.243.000
2017	255	1.092.662.246.708	255	1.092.662.246.708

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017 (Data diolah)

Jumlah investor yang berkontribusi di Kabupaten Buleleng dalam menanamkan modalnya juga mengalami perkembangan secara fluktuatif dari 40 sampai 181 investor, dengan jumlah investasi yang terserap secara fluktuatif. Berkaitan dengan jumlah investor dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Jumlah Investor PMDN / PMA Tahun 2012 s.d. 2017 Kabupaten Buleleng

Tahun (1)	Uraian (2)	PMDN (3)	PMA (4)	Total (5=3+4)
2012	Jumlah Investor	181	0	181
2013	Jumlah Investor	40	0	40
2014	Jumlah Investor	156	0	156
2015	Jumlah Investor	157	0	157
2016	Jumlah Investor	156	0	156
2017	Jumlah Investor	255	0	255

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP

Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non izin dan pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2.5.1. Tantangan yang Dihadapi

Adapun Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga/ instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan,adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kabupaten buleleng yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini;
- b. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada

masyarakat khususnya bagi para palaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng;

- c. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
- d. Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (IT Based) yang up to date, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;
- e. Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang hingga saat ini belum tersedia dan masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus berani mengambil peran, bersinergi dan berkolaborasi untuk mensinkronkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari hulu hingga hilir.
- f. Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal di daerah ini, sehingga aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang penanaman modal daerah. Keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dengan SKPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan di daerah;
- g. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan.

- h. Business Process PTSP yang belum optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Business Process yang tepat bagi PTSP, yaitu harus memiliki core business yang jelas, yaitu fungsi pemberian perizinan, penolakan perizinan, legalisasi dan duplikasi perizinan, pengawasan perizinan, pencabutan perizinan, pengaduan perizinan serta pengkajian dan monev perizinan dalam rangka penyerderhanaan birokrasi.
- i. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Buleleng untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Buleleng.
- j. Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti.
- k. Pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng harus berada pada satu kawasan dengan pusat konsultasi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RTRW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagakerjaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu.
- l. Dampak dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, akan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.

2.5.2. Peluang Yang Dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kabupaten Buleleng di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di

Kabupaten Buleleng. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Letak geografis Kabupaten Daerah yang sangat strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan.
- b. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
- c. Tersedianya anggaran yang memadai dari sumber-sumber pendapatan yang sah yaitu APBN, APBD Provinsi Bali, dan APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2017 – 2022 RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
- d. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Buleleng.
- e. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
- f. Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Daerah Buleleng.
- g. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Daerah Buleleng.
- h. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km²(24,25 %) Luas Wilayah Pulau Bali). Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 642,3 ribu Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata 470 jiwa/km². Secara administrasi Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9Kecamatan, 19 Kelurahan, 129 Desa, 63 Lingkungan, 557 Banjar Dinas, 167 Desa Adat.

Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2016 terdiri atas lahan kering, 37,413 Ha (27,39%) kawasan hutan dan hutan lainnya 44.681 Ha (32,71%) dan perkebunan 31.834 Ha (23,31 %). Pola penggunaan lahan ini cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya, sebagai akibat adanya alih fungsi dari lahan pertanian (sawah) menjadi pemukiman atau Lahan usaha pariwisata. Kondisi ini menimbulkan Peningkatan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. Disamping itu juga meningkatkan investasi untuk menunjang pembangunan Daerah.

Patut disyukuri bahwa daerah Buleleng memiliki nilai-nilai budaya yang unik beserta keindahan panorama alamnya termasuk alam lautnya yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan manca negara sekaligus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Daerah Bali pada umumnya dan disamping itu masyarakat Buleleng juga memiliki keterampilan di bidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara. Kondisi ini perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi kekuatan didalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang mudah,cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - 1) Memastikan bahwa pelayanan perijinan dan non perijinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perijinan dan nonperijinan yang ada dan berlaku;
 - 2) Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - 3) Tersediannya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah,kompeten dan profesional;

- 4) Tersedianya data potensi dan data eksisting perijinan dan non perijinan yang up to date, valid dan terukur.
- b. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam bidang pelayanan perijinan dan non perijinan. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan perijinan dan non perijinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan OPD teknis terkait dan data yang akurat.
 - c. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perijinan dan nonperijinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perijinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan nonperijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
 - d. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perijinan dan nonperijinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perijinan dan nonperijinan. Dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 bank arsip perijinan dan nonperijinan yang representatif.
 - e. Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam proses pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perijinan dan nonperijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota

diantaranya **Smart city, Livable city, Sustainable Development Goals (SDGs)** serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahap kedua, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2017- 2022), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Buleleng yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017–2022.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhi hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

- **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Rancangan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) Misi Pemerintah Daerah Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. 2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja /produktif. 3. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin. 4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah	Berkembangnya produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai produk pertanian. 2. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah 3. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dan koperasi.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga. 3. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan	Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (Sustainable Development)	Terwujudnya Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal. 2. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”.

3.2.3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
2. Berkembangnya produk unggulan daerah
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang professional, berbudaya dan berintegritas
4. Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik
6. Terwujudnya Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan

3.2.4. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Misi I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.
- b. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja /produktif.
- c. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.
- d. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.

2. Misi II : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;

Sasaran :

- a. Meningkatnya nilai produk pertanian.
- b. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah
- c. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dan koperasi.

3. Misi III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;

Sasaran :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.
 - b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga.
 - c. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Misi IV : Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
- Sasaran :
- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan .
5. Misi V : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
- Sasaran :
- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.
6. Misi VI : Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (Sustainable Development)
- Sasaran :
- a. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

3.3. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kabupaten Buleleng dengan Visi Misi Bupati Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng harus selaras dengan Visi dan Misi Bupati terpilih untuk masa pemerintahan 2017-2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung misi I yaitu “Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng akan meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan promosi investasi untuk produk-produk inovasi dan unggulan daerah sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng dan dengan membangun sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi informasi. Pembangunan sistem informasi ini juga dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan terpadu serta promosi investasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menarik pasar investasi yang lebih luas.

Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2013-2017, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk menjawab visi dan misi tersebut ditempuh dengan strategi pengembangan sebaran investasi PMDN dan PMA, arah kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indikatornya adalah persentase peningkatan nilai investasi yang dijabarkan didalam 2 (dua) program prioritas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yaitu:

- a. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi
- b. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
- c. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B

Dari ketiga program prioritas tersebut tujuan Indikatornya adalah Meningkatnya nilai investasi dan sasaran adalah meningkatnya investasi dan realisasi investasi, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A, dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B. Dari uraian diatas maka dapat di lihat dalam Tabel 3.2 terkait Cascading Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2017 - 2022

Tabel 3.2. Cascading Renstra DPMPTSP Kabupaten Buleleng

VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran			PROGRAM PER SASARAN
							Indikator	Satuan	Penanggung Jawab	
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana	Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Nilai Investasi	Rupiah	Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi PM	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi
						Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	Nilai	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
						Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	Nilai	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B

3.4. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan

perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Bali pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng 2017-2022, program prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng diarahkan pada 3 program prioritas serta program penunjang lainnya sebagai berikut :

Program prioritas yaitu:

- a. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi
- b. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
- c. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B

Sedangkan program penunjang yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Anggaran
7. Program Informasi Pembangunan Daerah
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
9. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan
10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

3.5. Telaah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaah RTRW

Dalam kebijakan RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013 - 2033 yang memosisikannya sebagai bagian dalam Propinsi Bali, yaitu di BPMPTSP sebagai ledingsektor pembangunan Nasional yang mana indikasi program RTRW Kabupaten /Kota adalah Perwujudan rencana sistem pusat pusat pembangunan kawasan dengan indikasi rencana program RPJMD Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan pelayanan perijinan Terpadu. Yang mana program dalam RPJMD tersebut sudah memprioritaskan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan rencana RTRW Kabupaten Buleleng.

3.5.2. Telaah KLHS

Berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Buleleng tahun 2075, isu-isu pembangunan Kabupaten Buleleng dirumuskan berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.3 Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan

No	Permasalahan Pembangunan
Bidang Lingkungan:	
1.	Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)
2.	Pencemaran Lingkungan oleh air limbah
3.	Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal
4.	Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun.
5.	Ancaman perubahan iklim
Bidang Ekonomi:	
1.	Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda.
2.	Daya saing UMKM masih rendah.
3.	Kondisi ekonomi pedesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun keluar daerah.
4.	Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata.
5.	Iklim Investasi belum kondusif.
	Kondisi Infrastruktur kawasan strategis belum optimal.
6.	Kesenjangan ekonomi antar wilayah pedesaan dan kecamatan masih tinggi
Bidang Sosial:	
1.	Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing.
2.	Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata.
3.	Kemiskinan dan pengangguran.
4.	PMKS dan Pelayanan sosial.
5.	Pelestarian Budaya.
6.	Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal.
7.	Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan, selanjutnya dirumuskan daftar pendek permasalahan pembangunan yang ditetapkan sebagai isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng seperti yang tertera pada tabel :

Tabel 3.4. Isu Strategis di Kabupaten Buleleng

No	Permasalahan Pembangunan
Bidang Lingkungan:	
1.	Pengelolaan sampah
3.	Pencemaran sungai akibat limbah domestik dan sampah
4.	Pasokan air bersih masih minim
5.	Banjir, dan tanah longsor
6.	Pendangkalan dan penyempitan situ-situ
7.	Reklamasi (pengurukan) situ oleh masyarakat/pengembang untuk permukiman
8.	Sempadan sungai belum tertata
9.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Bidang Sosial-Ekonomi	
1.	Tingginya tingkat kemiskinan Kemiskinan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelayanan publik yang belum optimal
3.	Tingginya kesenjangan dan kerawanan social
4.	Kualitas SDM belum optimal

Atas isu-isu strategis berdasarkan hasil identifikasi KLHS tersebut, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan Dpmpptsp yaitu pelayanan publik yang belum optimal Faktor pendorong belum optimalnya pelayanan publik antara lain adalah : (1) lapangan kerja yang terbatas dan tidak merata; (2) pertumbuhan penduduk yang tinggi; (3) rendahnya kualitas angkatan kerja (rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja); (4) akses yang sulit terhadap kepemilikan modal; dan (5) rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Kapan pelayanan dikatakan baik apabila :

1. Satu pelayanan yang efisien artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Kedua; pelayanan yang non partisipan sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayanan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan etnik, agama kepartaian, latar belakang penggunaan pelayanan tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam memberikan

pelayanan. Penyelenggaraan pemberian pelayanan berdasarkan pada prinsip *equal before the law* kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

3. Ketiga; adalah efektif dan responsif yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit.

Untuk mewujudkan kriteria pelayanan yang baik tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dapat di kelaborasi dari aspek potensi dan masalah yang digali dari kondisi existing Daerah Buleleng itu sendiri terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menyusun program dan kegiatan selama periode 2017-2022.

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Buleleng sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menggunakan metode analisa Teori SWOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun pengertian dari Analisa Teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapidengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan tantangan (*Threat*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat dilihat dari internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis tersebut sesuai dengan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

3.6.1 Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis
- b. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- d. Sudah adanya *masterplan* wilayah dalam kaitannya dengan penentuan titik pemasangan papan reklame;
- e. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
 - 1) Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
 - 2) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 3) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
 - 4) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan terutama sarana dan prasarana gedung kantor dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor;
- f. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.

3.6.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.

- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.
- f. Merupakan daerah perkotaan sehingga berpotensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
- g. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng yang mampu menyerap tenaga kerja
- h. Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala Nasional sebagai tempat promosi peluang investasi di Kabupaten Buleleng

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal PPTSP Kabupaten Buleleng

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng lima tahun kedepan 2017 - 2022 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”** dengan Misi I) Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif; 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas; 4) Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan; 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik; 6) Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelarakan Tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 1 (satu) yaitu **“Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“ daya saing ”** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng

dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: *“pertumbuhan ekonomi yang inklusif”* melalui tujuan yaitu :

- a. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penanaman modal dan perijinan

4.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng adalah *“meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan”* melalui :

- a. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng;
- b. Kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
- c. Meningkatnya layanan perijinan melalui DPMPPTSP;
- d. Meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang penanaman modal dan perijinan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, tim melakukan Kajian/review Internal. Berikut tujuan sasaran dan indikator sasaran hasil kajian/Review

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Hasil Kajian/Review

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng	Jumlah Investor PMA/ PMDN	Jumlah Investor PMA/ PMDN
					Kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan	Nilai Investasi	Nilai Investasi
					Meningkatnya layanan perijinan melalui DPMPPTSP	Presentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perijinan	Presentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perijinan
					Meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang penanaman modal dan perijinan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai AKIP Presentase BMD dalam keadaan Baik Nilai Rata-rata SKP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi I yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- c. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

5.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan bagi investor;
- c. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
- d. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;
- e. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- f. Merumuskan Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan;
- h. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Tabel 5.1 berikut menampilkan matrik keterkaitan tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang di Renstra Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng.

Tabel 5.1. Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang tertuang di RPJMD dengan Renstra DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan	Persentase peningkatan nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng; Kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;	Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan; Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;	Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/bagian dan kelembagaan lainnya; Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan bagi investor; Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi; Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan
				Meningkatnya profesionalisme aparaturnya di bidang penanaman modal dan perijinan.	Meningkatnya layanan perijinan melalui DPMPTSP.	Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional; Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan; Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan penetapan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Bab sebelumnya dapat dilakukan melalui program-program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Sebagai Program Penunjang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah
- n. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- e. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
- i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
- j. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- k. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
- l. Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor

- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - d. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- 6. Program Perencanaan Anggaran SKPD**
 - a. Penyusunan Anggaran SKPD

- 7. Program Informasi Pembangunan Daerah**
 - a. Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu :

- 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - a. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
 - c. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
 - d. Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal

- 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
 - a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal
 - f. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

- a. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi

4. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
- b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
- c. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
- d. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan
- e. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Urusan Pariwisata dan Badan Usaha
- f. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang A I,II pada Sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU
- g. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang A III Pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Ijin IUJK, Reklame.
- h. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan
- i. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang B III pada Sektor Pariwisata dan Kesehatan

6.2.Indikasi Pendanaan Program dan Kegiatan dalam Jangka Menengah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dalam menjabarkan tupoksinya melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan dalam jangka menengah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka disusun Matriks Program dan pendanaan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran SKPD Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng. Adapun indikasi pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100%	1.368.577.000	100%	1.500.589.409,59	100%	1.514.083.378,67	100%	1.533.749.160,04	100%	1.720.597.766,63	100%	7.637.596.714,93	DPMPPTSP	Buleleng
			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1000 Exemplar	1100 Exemplar	59.282.500	1200 Exemplar	65.210.750	1300 Exemplar	71.731.500	1400 Exemplar	78.904.000	1500 Exemplar	86.794.400	361.923.150	DPMPPTSP	Buleleng
			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	41 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	55.000.000	84 Rekening Kantor	60.500.000	84 Rekening Kantor	66.550.000	84 Rekening Kantor	73.205.000	84 Rekening Kantor	80.525.500	335.780.500	DPMPPTSP	Buleleng
			003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	2 Unit/Bulan	2 Unit/Bulan	170.000.000	2 Unit/Bulan	187.000.000	2 Unit/Bulan	187.000.000	2 Unit/Bulan	187.000.000	2 Unit/Bulan	187.000.000	918.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya tepat waktu	17 Unit	22 Unit	9.800.000	24 Unit	10.780.000	24 Unit	11.858.000	28 Unit	13.043.800	30 Unit	14.348.180	59.829.980	DPMPPTSP	Buleleng
			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	250.800.000	12 Dokumen	275.880.000	12 Dokumen	303.468.000	12 Dokumen	315.000.000	12 Dokumen	320.000.000	1.465.148.000	DPMPPTSP	Buleleng
			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	28 Jenis	114.700.000	28 Jenis	126.170.000	28 Jenis	138.787.000	28 Jenis	145.000.000	28 Jenis	145.000.000	669.657.000	669.657.000	Buleleng
			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	51 Jenis	50 Jenis	199.862.500	50 Jenis	219.848.750	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	250.000.000	1.069.711.250	DPMPPTSP	Buleleng
			011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	9 Jenis	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	75.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	4 Jenis	8 Jenis	9.000.000	8 Jenis	9.900.000	8 Jenis	10.890.000	8 Jenis	11.979.000	8 Jenis	13.176.900	54.945.900	DPMPPTSP	Buleleng
			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	70 Unit	27 Unit	259.207.000	30 Unit	281.782.409,59	30 Unit	241.679.628,67	30 Unit	219.832.760,04	30 Unit	280.589.726,63	1.283.091.525	DPMPPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				disediakan																
			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36 Rekening / Tahun	36 Rekening / Tahun	6.600.000	36 Rekening/ Tahun	7.260.000	36 Rekening/ Tahun	7.986.000	36 Rekening/ Tahun	8.784.600	36 Rekening/ Tahun	9.663.060	40.293.660	DPMPTSP	Buleleng	
			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	19.925.000	6 Jenis	21.917.500	6 Jenis	24.109.250	6 Jenis	25.000.000	6 Jenis	27.500.000	118.451.750	DPMPTSP	Buleleng	
			018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	2 OH	115 OH	125.000.000	115 OH	137.500.000	115 OH	145.000.000	115 OH	150.000.000	115 OH	200.000.000	757.500.000	DPMPTSP	Buleleng	
			022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	-	2 Dokumen	74.400.000	2 Dokumen	81.840.000	2 Dokumen	90.024.000	2 Dokumen	91.000.000	2 Dokumen	91.000.000	428.264.000	DPMPTSP	Buleleng	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		100%	392.000.000	100%	472.776.300	100%	507.772.400	100%	546.027.600	100%	567.350.200	100%	2.485.926.500	DPMPTSP	Buleleng
			003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng	
			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	3 Unit	2 Unit	45.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	50.000.000	345.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	-	1 Set	10.000.000	1 Set	-	1 Set	-	1 Set	-	1 Set	38.200.000	48.200.000	DPMPTSP	Buleleng	
			012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	8 Jenis	7 Jenis	75.000.000	7 Jenis	50.776.300	7 Jenis	50.772.400	7 Jenis	80.027.600	7 Jenis	57.350.200	313.926.500	DPMPTSP	Buleleng	
			019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	-	10 Kegiatan	30.000.000	10 Kegiatan	40.000.000	10 Kegiatan	35.000.000	10 Kegiatan	38.500.000	10 Kegiatan	42.350.000	185.850.000	DPMPTSP	Buleleng	
			022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	-	2 Unit	30.000.000	2 Unit	39.000.000	1 Unit	40.000.000	2 Unit	44.000.000	2 Unit	48.400.000	201.400.000	DPMPTSP	Buleleng	
			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	13 Unit	22 Unit	85.000.000	24 Uni	85.000.000	26 Uni	95.000.000	28 Uni	100.000.000	30 Uni	110.000.000	475.000.000	DPMPTSP	Buleleng	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	6 Unit	7 Unit	7.000.000	7 Unit	15.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	15.500.000	7 Unit	17.050.000		74.550.000	DPMPTSP	Buleleng
			028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	10 Unit	15 Unit	15.000.000	15 Unit	16.000.000	15 Unit	17.000.000	15 Unit	18.000.000	15 Unit	19.000.000		85.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			040	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	-			DPMPTSP	Buleleng
			045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	-	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	77.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	185.000.000		632.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-		125.000.000	DPMPTSP	Buleleng
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD		100%	145.000.000	100%	174.879.000	100%	187.824.000	100%	201.974.500	100%	217.259.600	100%	926.937.100	DPMPTSP	Buleleng
			001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	2 Unit	30.000.000	-	-	-	-		30.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	-	40 Stel	25.000.000	40 Stel	50.000.000	40 Stel	25.000.000	40 Stel	50.000.000	40 Stel	17.259.600		167.259.600	DPMPTSP	Buleleng
			005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	34 Potong	40 Stel	25.000.000	40 Stel	24.879.000	40 Stel	32.824.000	40 Stel	41.974.500	40 Stel	50.000.000		174.677.500	DPMPTSP	Buleleng
			006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	95.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	150.000.000		555.000.000	DPMPTSP	Buleleng
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD		100%	20.000.000	100%	24.121.200	100%	25.906.750	100%	27.858.500	100%	29.966.800	100%	127.853.250	DPMPTSP	Buleleng
			003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	2 OH	4 OH	20.000.000	4 OH	24.121.200	4 OH	25.906.750	4 OH	27.858.500	4 OH	29.966.800		127.853.250	DPMPTSP	Buleleng
		Meningkatnya akntabilitas kinerja SKPD		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD		100%	112.490.000	100%	135.669.900	100%	145.712.500	100%	156.690.400	100%	168.548.500	100%	719.111.300	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	6 Dokumen	67.490.000	6 Dokumen	85.000.000	6 Dokumen	90.000.000	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	100.000.000	442.490.000	DPMPPTSP	Buleleng	
			004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.669.900	1 Laporan	55.712.500	1 Laporan	56.690.400	1 Laporan	68.548.500	276.621.300	DPMPPTSP	Buleleng	
			Program Perencanaan Anggaran SKPD		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	180.909.300	4 Dokumen	194.300.600	4 Dokumen	208.939.150	4 Dokumen	224.751.300	4 Dokumen	958.900.350	DPMPPTSP	Buleleng
			001	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	180.909.300	4 Dokumen	194.300.600	4 Dokumen	208.939.150	4 Dokumen	224.751.300	958.900.350	DPMPPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	1 Dokumen	1 kali/5 investor	697.388.000	1 kali/5 investor	701.093.300	1 kali/5 investor	753.353.100	1 kali/5 investor	771.411.000	1 kali/5 investor	944.926.000	5 Dokumen	3.868.171.400	DPMPPTSP	Buleleng
			001	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	1 Kali	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	121.000.000	531.000.000	DPMPPTSP	Buleleng	
			013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	4 Kali	5 Investor	290.000.000	5 Investor	290.000.000	5 Investor	290.000.000	5 Investor	300.000.000	5 Investor	330.000.000	1.500.000.000	DPMPPTSP	Buleleng	
			014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	2 Kali	7 Kali	307.388.000	7 Kali	200.000.000	7 Kali	210.000.000	7 Kali	210.000.000	7 Kali	300.000.000	1.227.388.000	DPMPPTSP	Buleleng	
			018	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	111.093.300	1 Dokumen	153.353.100	1 Dokumen	151.411.000	1 Dokumen	193.926.000	609.783.400	DPMPPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Nilai investasi		1.248.778.389.000	645.000.000		-		-		-		-	1.248.778.389.000	645.000.000	DPMPPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			005	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	1 Aplikasi	2 Sistem	209.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	209.500.000	DPMPTSP	Buleleng
			007	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	144.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	144.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	100 Investor	4 Dokumen	60.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.500.000	DPMPTSP	Buleleng
			012	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50 Perusahaan	100 Pengusaha	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			013	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	171.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	171.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			014	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	1	5 Kasus	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000									145.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			001	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu yang transparan dan akuntabel	80,60 Nilai	80,60 Nilai	1.146.605.000									80,60 Nilai	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			004	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	4 Buku	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			006	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	9 Kecamatan	3 Media	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	66.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			010	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	3000 Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng
			011	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	Jumlah berkas izin usaha urusan pariwisata dan badan usaha yang diverifikasi dan diteliti	3000 Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng
			012	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	2500 Izin	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			013	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	500 Izin	126.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000.000	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			014	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 Izin	230.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	230.605.000	DPMPPTSP	Buleleng
			015	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 Izin	164.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi		Nilai investasi	1.236.414.246.708	-	1.261.266.173.000	997.789.100	1.273.878.834.000	1.103.868.500	1.286.617.623.000	1.187.033.100	1.299.483.799.000	1.310.866.000	1.299.483.799.000	4.599.556.700	DPMPPTSP	Buleleng
			001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	-	-	-	2 Sistem	240.000.000	2 Sistem	270.000.000	2 Sistem	280.000.000	2 Sistem	305.000.000	1.095.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			002	Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	-	-	-	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	210.000.000	735.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	-	-	-	4 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	130.000.000	425.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	-	-	100 Pengusaha	70.000.000	100 Pengusaha	88.000.000	100 Pengusaha	90.000.000	100 Pengusaha	110.000.000	358.000.000	DPMPPTSP	Buleleng
			005	Penyusunan Perencanaan Penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	-	-	-	3 Dokumen	195.000.000	3 Dokumen	205.000.000	3 Dokumen	210.000.000	3 Dokumen	220.000.000	830.000.000	DPMPPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			006	Penyelesaian Permasalahan Penanaman	Jumlah kasus yang difasilitasi	-	-	-	5 Kasus	57.910.100	5 Kasus	55.492.900	5 Kasus	68.438.300	5 Kasus	75.430.800	257.272.100	DPMPPTSP	Buleleng	
			007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	-	-	-	1 Dokumen	184.879.000	1 Dokumen	202.824.000	1 Dokumen	221.974.500	1 Dokumen	247.259.600	856.937.100	DPMPPTSP	Buleleng	
			008	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.551.600	1 Dokumen	16.620.300	1 Dokumen	13.175.600	42.347.500	DPMPPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan		Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	402.876.900	100%	480.240.900	81.25 nilai	566.758.100	100%	599.632.800	100%	2.049.508.700	DPMPPTSP	Buleleng	
			001	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	-	-	-	4 Buku	92.876.900	4 Buku	115.240.900	4 Buku	145.137.800	4 Buku	181.457.200	534.712.800	DPMPPTSP	Buleleng	
			002	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	-	-	-	3 Media	200.000.000	3 Media	225.000.000	3 Media	255.000.000	3 Media	255.000.000	935.000.000	DPMPPTSP	Buleleng	
			003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	-	-	-	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	166.620.300	2 Dokumen	163.175.600	579.795.900	DPMPPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	-	-	80.80 Nilai	645.000.000	81.00 Nilai	710.551.600	81.25 nilai	806.620.300	81,50 Nilai	803.175.600	81,50 Nilai	2.965.347.500	DPMPPTSP	Buleleng
			001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	2500 Izin	450.000.000	2500 Izin	500.000.000	2500 Izin	570.000.000	2500 Izin	560.000.000	2.080.000.000	DPMPPTSP	Buleleng	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	500 Izin	195.000.000	500 Izin	210.551.600	500 Izin	236.620.300	500 Izin	243.175.600	885.347.500	DPMPTSP	Buleleng
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	-	-	80,80 Nilai	540.000.000	81,00 Nilai	600.551.600	81,25 nilai	686.620.300	81,50 Nilai	613.175.600	81,50 Nilai	2.440.347.500	DPMPTSP	Buleleng
			001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	1500 Izin	320.000.000	1500 Izin	380.000.000	1500 Izin	450.000.000	1500 Izin	370.000.000	1.520.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	1500 Izin	220.000.000	1500 Izin	220.551.600	1500 Izin	236.620.300	1500 Izin	243.175.600	920.347.500	DPMPTSP	Buleleng
							4.822.060.000		5.775.704.409,59		6.224.165.328,67		6.693.682.110,04		7.200.250.166,63		30.715.862.014,93		

Tabel 6.2 Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA DPMPPTSP KABUPATEN BULELENG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi ke 1 : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif								
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1.236.414.246.708	1.248.778.389.000 (1%)	1.261.266.173.000 (1%)	1.273.878.835.000 (1%)	1.286.617.623.000 (1%)	1.299.483.799.000 (1%)	1.299.483.799.000 (1%)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) penanaman Modal.

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome sebagaimana dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	
5		6	7	10	12	14	16	18	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1000 Exemplar	1100 Exemplar	1200 Exemplar	1300 Exemplar	1400 Exemplar	1500 Exemplar	6500 Exemplar
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	41 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	420 Rekening Kantor
003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	2 Unit/ Bulan	2 Unit/ Bulan	2 Unit/ Bulan	2 Unit/ Bulan	2 Unit/ Bulan	2 Unit/ Bulan	10 Unit
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	17 Unit	22 Unit	24 Unit	24 Unit	28 Unit	30 Unit	30 Unit
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60 Dokumen
008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	51 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	9 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	4 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 Unit	27 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	147 Unit
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36 Rekening/ Tahun	36 Rekening/ Tahun	36 Rekening/ Tahun	36 Rekening/ Tahun	36 Rekening/ Tahun	36 Rekening/ Tahun	180 Rekening/ Tahun
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	2 OH	115 OH	115 OH	115 OH	115 OH	115 OH	575 OH
022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	-	2 Unit

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	
5		6	7	10	12	14	16	18	20
005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10 Unit
010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	-	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	5 Set
012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	8 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	50 Kegiatan
022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	-	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	13 Unit	22 Unit	24 Uni	26 Uni	28 Uni	30 Uni	30 Uni
026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	6 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	35 Unit
028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	10 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	75 Unit
040	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit
045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang disediakan	1 Unit	-	-	2 Unit	-	-	2 Unit
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	-	40 Stel	40 Stel	40 Stel	40 Stel	40 Stel	200 Stel
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	34 Potong	40 Stel	40 Stel	40 Stel	40 Stel	40 Stel	200 Stel
006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparaturnya yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	2 OH	4 OH	4 OH	4 OH	4 OH	4 OH	20 OH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	30 Dokumen
004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan
Program Perencanaan Anggaran SKPD		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
001	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	1 Dokumen	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	5 Kali/25 Investor
001	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	4 Kali	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	25 Investor
014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	2 Kali	7 Kali	7 Kali	7 Kali	7 Kali	7 Kali	35 Kali

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	
5		6	7	10	12	14	16	18	20
018	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Nilai investasi	1.236.414.246.708	1.248.778.389.000					1.248.778.389.000
005	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	1 Aplikasi	2 Sistem	-	-	-	-	2 Sistem
007	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen
009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	100 Investor	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen
012	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50 Perusahaan	100 Pengusaha	-	-	-	-	100 Pengusaha
013	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen
014	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	1	5 Kasus	-	-	-	-	5 Kasus
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Peningkatan Potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen
001	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen
Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu yang transparan dan akuntabel	80,60 Nilai	80,60 Nilai					80,60 Nilai
004	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	4 Buku	-	-	-	-	4 Buku
006	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	9 Kecamatan	3 Media	-	-	-	-	3 Media
007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen
010	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	3000 Izin	-	-	-	-	-	
011	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	Jumlah berkas izin usaha urusan pariwisata dan badan usaha yang diverifikasi dan diteliti	3000 Izin	-	-	-	-	-	
012	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	2500 Izin	-	-	-	-	2500 Izin
013	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	500 Izin	-	-	-	-	500 Izin
014	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 Izin	-	-	-	-	1500 Izin
015	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perizinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 Izin	-	-	-	-	1500 Izin

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	
5		6	7	10	12	14	16	18	20
Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi		Nilai investasi	1.236.414.246.708		1.261.266.173.000	1.273.878.834.000	1.286.617.623.000	1.299.483.799.000	1.299.483.799.000
001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	-	-	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	8 Sistem
002	Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	16 Dokumen
004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	-	100 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	400 Pengusaha
005	Penyusunan Perencanaan Penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen
006	Penyelesaian Permasalahan Penanaman	Jumlah kasus yang difasilitasi	-	-	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	20 Kasus
007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
008	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%
001	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	-	-	4 Buku	4 Buku	4 Buku	4 Buku	16 Buku
002	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	-	-	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media
003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen
Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	-	80.80 Nilai	81.00 Nilai	81.25 nilai	81,50 Nilai	81,50 Nilai
001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	2500 Izin	2500 Izin	2500 Izin	2500 Izin	10000 Izin
002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	500 Izin	500 Izin	500 Izin	500 Izin	2000 Izin
Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	-	80.80 Nilai	81.00 Nilai	81.25 nilai	81,50 Nilai	81,50 Nilai
001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	10000 Izin
002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	2000 Izin

7.2. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- 1. Penanaman Modal Asing atau (PMA)** merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja
- 2. Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya SK perijinan. Proses penyelesaian perijinan tersebut dilakukan dalam satu tempat, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance*.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng 2017-2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup strategis juga mempedomani ataupun berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Renstra ini substansinya memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun kedepan.

Renstra ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Buleleng serta dalam penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam lima tahun kedepan, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh Bagian/Bidang yang ada di dalam jajaran kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi;
- 3) Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun kedepan.

8.2. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PPTSP 2017 – 2022 ini sangat tergantung dari sikap, mental, semangat, ketaatan dan disiplin pelaksana. Terkait hal tersebut, diharapkan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Buleleng untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan tepat waktu demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memberikan pelayanan di bidang Perizinan dituntut adanya regulasi yang senantiasa mampu memberikan kepastian hukum untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait maupun pelaksana, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Kepastian Hukum sebagai kerangka acuan kerja akan mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*, ditengah dinamisnya perkembangan di segala sector, oleh karena itu maka dibutuhkan suatu rencana kerja yang memiliki landasan berpijak yang kuat dan jelas agar tidak menimbulkan keraguan sehingga aktivitas yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien serta multi tafsir.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, SH

Pembina Tk. I

NIP.19660602 199403 1 011

LAMPIRAN

												Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
												Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	
												Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	
												Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	
												Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	
												Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	
												Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	

			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	81,25 Nilai	81,50 Nilai			Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I.II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	
												Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	81,25 Nilai	81,50 Nilai			Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I.II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	

												Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada Sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan									
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim									
																				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	
																				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	
																				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	
																				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	
															Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu						
															Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu						
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu						

												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	
												Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	
												Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	
												Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	
				Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	
												Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	
												Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	

												Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai		
												Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai		
												Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai		
												Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai		
												Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata		
												Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata		
				Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%			Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	
												Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	
													Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	
												Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	

			Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD								Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	
				Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				0	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu
											Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	

Singaraja, 14 Pebruari 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, SH
Pembina Tk.I
NIP.19660602 199403 1 011